

**INOVASI MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR  
BERBASIS MODAL SOSIAL DI KABUPATEN TANGERANG**

**Sugiyanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: [ugesugiyanto@gmail.com](mailto:ugesugiyanto@gmail.com)

**Abstract**

*The development of coastal areas based on the social capital of the surrounding community will foster a sense of shared ownership and responsibility for development carried out by the Government. However, the condition is that existing social capital is strong. In this study, researchers found the characteristics of social capital in Dadap Village to be strong, both in social networks, norms, and beliefs, while Tanjung Pasir Village was classified as moderate. Meanwhile, Suryabahari Village is classified as weak, especially in the aspects of social networks and trust. Social capital as one of the regional development capital is related to the level of community participation. Besides social capital, there are other interrelated capitals, such as human, environmental, financial, and physical. In general, regional development in coastal areas is more mainstream in physical capital such as infrastructure. The implication is that development only assessed by the availability of infrastructure. Of course this is related to sustainable development which tends not to occur, especially management problems because of the disharmony between capital development.*

**Keyword:** *Social Capital; Development; Coastal Area.*

## Pendahuluan

Sebagaimana diketahui dalam berbagai media bahwa kawasan pinggiran saat ini menjadi prioritas pembangunan. Hal ini untuk menggali potensi lokal yang ada sehingga mampu meningkatkan nilai dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Salah satu daerah pinggiran yang menjadi fokus pembangunan nasional adalah kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang. Dalam berbagai agenda pembangunan nasional, kawasan tersebut dianggap memiliki potensi sumberdaya alam yang mampu dioptimalkan guna menyokong kehidupan nelayan dan warga setempat lainnya. Kehadiran nelayan sendiri memiliki manfaat tidak hanya bagi keluarga dan desanya, tetapi juga bagi daerah domisilinya karena pengaruh perputaran uang (keluar masuk antara daerah, khususnya DKI Jakarta) di sektor kenelayanan.

Secara *das sollen*, potensi alam yang ada di kawasan pesisir tentu berkontribusi besar terhadap roda perekonomian masyarakat setempat. Bahkan, 2/3 wilayah di Indonesia merupakan daerah perairan. Namun demikian, secara *das sein* kondisi yang dihadapi masyarakat di kawasan pesisir justru berkebalikan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi tatatan permukiman yang tidak teratur dan cenderung kumuh. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Fujiastuti (2011) bahwa sebesar 60% permukiman kumuh terletak di kawasan pesisir. Keterbelakangan yang terjadi di kawasan pesisir tidak hanya dilihat dari permukiman kumuh, melainkan dari sisi kualitas sumberdaya manusia yang dapat dikatakan rendah. Sebagai contoh, kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang dengan studinya Kelurahan Dadap dan Desa Tanjung Pasir yang mayoritas penduduk hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (Data Monografi Kelurahan Dadap Tahun 2016 dan Data Monografi Desa Tanjung Pasir Tahun 2017). Bahkan untuk penduduk yang tidak sekolah juga terhitung banyak. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan yang dialami sehingga tidak mampu membiayai pendidikan sektor formal. Selain itu, kesulitan akses menuju sekolah karena jarak tempuh yang jauh dan jarangnyanya kendaraan umum merupakan faktor lainnya.

Berkaitan dengan kemiskinan, BPS dalam <https://beritagar.id> (diakses 7 Maret 2018) menyatakan bahwa pendapatan per kapita nelayan di perairan umum hanya sebesar Rp. 642.350,00, sementara itu nelayan laut sebesar Rp. 737.030,00. Berdasarkan data tersebut, tentu saja angka pendapatan nelayan jauh dari standar upah minimum. Sebagai contoh, artikel dalam <https://daerah.sindonews.com> (diakses 7 Maret 2018) menyebutkan bahwa di Kabupaten Tangerang besaran upah minimumnya adalah Rp. 3.555.834,67. Dengan melihat standar upah

minimum kabupaten dan kota (UMK), maka pendapatan nelayan jauh dari kata layak. Masalah kemiskinan di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang telah menjadi isu umum karena rendahnya modal dari sisi finansial. Oleh sebab itu, masyarakat di kawasan tersebut sulit untuk keluar dari jaring-jaring kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang baik.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Tahun 2018 di Kecamatan Tangerang, masyarakat lebih antusias dan fokus pada pembangunan infrastruktur saja, seperti drainase, gotong royong, jalan lingkungan, rumah, dan sebagainya (dilansir dalam <https://tangerangonline.id>, diakses 7 Maret 2018). Asumsinya adalah dengan prioritas pembangunan fisik akan mampu mengurangi *gap* kesenjangan pembangunan daerah dan sebagai stimulan pada pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pembangunan fisik tentu akan menjadi awal dari menjamurnya bangunan fisik sekitarnya sehingga berimbas pula pada kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat. Memang dapat diakui bahwa kawasan pantai utara (pantai utara) tergolong daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan, terutama dalam infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki *multiplier effect* kepada industri lokomotif pembangunan daerah (Sugiarto, 2017). Akan tetapi, pembangunan daerah yang hanya terfokus pada pembangunan fisiknya saja tentu berdampak pada ketidakseimbangan terhadap dimensi pembangunan lainnya, terutama kondisi sosial budaya masyarakat sekitar.

Dalam hal pembangunan daerah, penekanan tidak hanya pada dimensi fisik tetapi juga manusianya. Kondisi di beberapa daerah memberikan fakta bahwa setelah pembangunan fisik justru menimbulkan permasalahan perubahan sosial budaya dan lingkungannya. Saat ini ada kecenderungan paham yang digunakan adalah pembangunan yang selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi saja seperti idaman kaum *developmentalism*. Dalam paham ini, pembangunan selalu identik dengan pertumbuhan fisik, sementara faktor alam dan lingkungan termasuk masyarakat hanya berperan sebagai faktor pendukungnya (Siahaan, 2004). Padahal, dalam konteks pembangunan, sinergitas antar dimensi pembangunan merupakan strategi untuk mewujudkan keberlanjutan.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi, terdapat tiga modal yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah, yaitu: modal alam, fisik, dan manusia (Iyer, 2005). Permasalahannya adalah modal manusia terutama daerah lokasi pembangunan belum menjadi bahasan prioritas. Modal manusia dianggap diletakkan setelah fisik dan alam serta cenderung

mengikuti di belakang. Terlebih dalam modal manusia terdapat pula modal sosial di mana perannya tidak kalah penting dalam pembangunan daerah, khususnya kawasan pinggiran. Secara garis besar, modal sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu: kepercayaan, norma, dan jaringan. Ketiga aspek tersebut ikut andil dalam pembangunan daerah non-ekonomi. Modal sosial dimaknai sebagai mediasi interaksi antar individu antar kelompok dalam rangka pembangunan dengan tujuan adanya peningkatan kesejahteraan (Iyer, 2005).

Pentingnya kontribusi modal sosial terhadap pembangunan daerah menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dalam kegiatan ini, peneliti mencoba menelaah karakteristik modal sosial di kawasan pesisir serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi pemanfaatan dan pengembangan modal sosial terhadap pengembangan di kawasan pesisir. Sebagai akademisi, peneliti mencoba berkontribusi dalam tridarma perguruan tinggi, salah satunya adalah penelitian berkaitan dengan menjawab atas permasalahan publik yang terjadi di lapangan. Melalui suara dan ide-ide yang dituangkan dalam kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh para pemangku/pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam pembangunan berbasis modal sosial.

### **Urgensi Pengembangan Kawasan Pesisir**

Kawasan pesisir bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun lebih dianggap strategis sebagai titik temu antara aktivitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut (Rustiadi, 2003 & Boteler, 2014). Hal ini dibuktikan pada masa lampau, kawasan pesisir sebagai pusat ekonomi pelabuhan dan pertumbuhan global. Lebih lanjut, Rustiadi (2003) menyebutkan bahwa kawasan pesisir mengandung tiga unsur *economic rent*, antara lain:

- a. *Ricardian rent* yang berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, misalnya: kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya tambak dan pengembangan pelabuhan;
- b. *Environment rent*, yaitu nilai dan fungsi kawasan pesisir didasarkan atas keseimbangan lingkungan; dan
- c. *Social rent*, yaitu manfaat posisi kawasan pesisir menyangkut berbagai fungsi sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Atas dasar ketiga unsur tersebut, bila dilihat dari kecenderungan pembangunan kawasan pesisir saat ini lebih berorientasi pada pembangunan fisik sebagai peningkatan ekonomi warganya. Alhasil, pembangunan tersebut menciptakan degradasi terhadap lingkungan dan sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan kawasan pesisir lebih ditujukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa aktor masih memandang kawasan pesisir sebagai *sources of growth* dari sektor perikanan dan kelautan sehingga merupakan peluang pengembangan investasi secara ekonomi saja. Lantas bagaimana dengan keberlanjutan pembangunan yang menekankan pula aspek lingkungan dan sosial budaya masyarakat sekitarnya. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir dengan tidak hanya menekankan pada nilai *profit*. Tantangan lainnya muncul sebagai *multiplier effect* pengembangan kawasan pesisir yaitu arus urbanisasi.

Urbanisasi sebagai dinamika pergerakan manusia yang memiliki dampak pada peningkatan kebutuhan infrastruktur. Implikasinya adalah pembangunan infrastruktur akan mendorong terhadap pengalihfungsian lahan-lahan, termasuk di kawasan pesisir (Astjario & Kusnida, 2011). Pertumbuhan penduduk baik fertilitas maupun migrasi berpengaruh terhadap kebutuhan ruang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk tersebut akan selalu menuntut terhadap perubahan ruang di kawasan pesisir seperti perluasan pelabuhan, tempat penangkapan ikan beserta sarana pendukungnya, sarana pendidikan dan kesehatan, dan industri kecil sehingga aktivitas di dalamnya akan menunjukkan adanya perkembangan kawasan permukiman. Polemik lainnya sebagai dampak perkembangan permukiman adalah peningkatan aliran air permukaan dan limbah yang secara langsung berimbas pada kerusakan lingkungan.

Clark (1996) dalam Astjario & Kusnida (2011) dan Pramudyanto (2014), mengungkapkan bahwa pengembangan sektor industri di kawasan pesisir akan berdampak terhadap pembangunan lainnya, tidak hanya positif namun juga negatif terhadap kegiatan ekonomi sekitarnya, yaitu: lahan pertanian pesisir, hutan mangrove, budidaya perikanan, kenelayanan, dan pariwisata. Terjadinya banjir rob, erosi, tumpukan sampah, dan pencemaran air limbah industri kecil dan domestik merupakan tampilan bencana sebagai akibat kurang efektif dan efisiennya pengembangan kawasan pesisir (Pramudyanto, 2014 & Department of the Environment, 2015). Ironisnya, masyarakat kerap tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan pesisir (Mashari & Mulyani, 2008). Selain itu, manusia pula yang melakukan eksploitasi dan tekanan terhadap lingkungan pesisir (Staehr, et al, 2018). Bahkan, masyarakat lokal karena

kemiskinan yang melanda justru seringkali melakukan kegiatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumberdaya, contohnya: penebangan mangrove untuk mengambil kayu bakar dan dijual atau digunakan sebagai lahan pertambakan (Lasabuda, 2013 & Musaddun, et al, 2013). Kemiskinan di kawasan pesisir merupakan tamparan terhadap teori pertumbuhan yang kaya sumberdaya laut namun tidak berbanding lurus dengan kualitas sumberdaya manusianya. Pada tahun 2015, angka kemiskinan di kawasan pesisir secara nasional sebesar 32,4% dengan faktor utamanya adalah rendahnya pengetahuan dan teknologi yang digunakan.

Kawasan pesisir tidak hanya sebagai roda ekonomi dari aktivitas penangkapan ikan, melainkan aktivitas kepariwisataan. Leijzer & Denman (2013) mengatakan kawasan pesisir memiliki potensi dengan mengandalkan berbagai atraksi wisata alam, antara lain: pantai, *landscape*, bebatuan, burung, ikan, mamalia laut, dan binatang lainnya. Selain itu, atraksi buatan terdiri dari kampung nelayan, perkotaan pesisir, tempat-tempat sejarah, pelabuhan, tempat penangkapan ikan (TPI), pasar ikan, dan segala aspek dalam kehidupan maritime. Dari studinya, Leijzer & Denman (2013) mengatakan bahwa pariwisata seharusnya memberikan keuntungan lebih bagi komunitas lokal dan pemerintah daerah bertugas untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas institusi lokal. Ditambahkan lagi bahwa kebijakan pembangunan pariwisata memiliki kelemahan yaitu aspek sosial kerap dilupakan sehingga tidak ada hubungan rasa kepemilikan.

### **Peran Modal Sosial dalam Konteks Pengembangan Daerah**

Salah satu masalah umum yang terjadi dalam pembangunan daerah adalah partisipasi semu oleh masyarakat lokal. Maksudnya, masyarakat lokal diajak berdialog dalam pembangunan hanya sekedar disampaikannya ada kegiatan pembangunan namun aspirasinya tidak tertuangkan dalam agenda tersebut. Gomes, Guerririo, & Riordan (2014) dalam Boteler (2014) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam diskusi publik pada manajemen pesisir tidak berpengaruh pada keluaran (perencanaan proyek). Rustiadi (2003) mengungkapkan bahwa perlu adanya pergeseran pembangunan daerah yang menitikberatkan ditujukan dan dilakukan oleh masyarakat lokal. Pembangunan ekonomi yang berbasis komunitas lokal atau *local community-based economy* sebagai paradigma pembangunan. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di mana diperlukan penyesuaian dengan kapasitas dan keadaan lingkungan sumberdaya sekitarnya. Bukan lagi dengan dominasi menggunakan lembaga swasta karena lebih berorientasi pada kepentingan

sendiri bukan kepentingan publik. Dengan demikian, sektor publik bergeser menjadi aktor fasilitator, penyedia infrastruktur publik, *enabler*, serta merancang kebijakan dan program dimana aktor utamanya adalah masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga harus bersedia dalam berpartisipasi untuk pengembangan pariwisata. Rahman (2015) mengungkapkan bahwa diperlukan inisiatif pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat lokal untuk berpartisipasi.

Beberapa pelaku diskusi perencanaan pembangunan di kawasan pesisir cenderung takut untuk bersuara sehingga antarstakeholders tidak terbangun jaringan dan kepercayaan (Hattam, Mangi, Gall, & Rodwell, 2014 dalam Boteler, 2014). Hal tersebut justru menunjukkan adanya kegagalan dalam agenda setting perumusan kebijakan pembangunan. Di sisi lain, mengurangi nilai sumberdaya dan aset terhadap pengembangan pariwisata karena tidak terjadi *network links & stakeholders* (Rahman, 2015). Dampaknya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan yang hanya menguntungkan beberapa pihak dan tidak semua masyarakat merasakan faedah dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian sangat diperlukan perhatian lebih pada isu sosial. Padahal, esensi pembangunan pariwisata ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan peluang kerja serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal (Tosun, 2001 dalam Rahman, 2015). Oleh sebab itu, proses pembangunan di daerah harus melihat potensi modal-modal yang dimiliki sebagai pondasi dan kekuatan di lingkungan masyarakat.

Bourdieu (1972) dalam Cvetanovic, et al (2015) berpendapat bahwa ada tiga pembeda modal, yaitu: ekonomi, sosial, dan simbol kebudayaan. Ketiga ini saling berhubungan dalam hak kebebasan termasuk partisipasi pembangunan. Sementara itu, Coleman (1988) membagi modal pembangunan, yaitu: fisik, manusia, dan sosial (Cvetanovis, et al, 2015). *Social capital* tersebut digunakan untuk menjalin antar individual dalam jaringan sosial, norma, dan kepercayaan di dalamnya.

Menurut Cvetanovis, et al (2015), modal pembangunan dibedakan menjadi modal pembiayaan, manusia, dan sosial. Modal pembiayaan meliputi aset, kewajiban-kewajiban, dan keadilan. Kemudian modal manusia meliputi orang, proses, dan strukturnya. Sedangkan modal sosial didalamnya terdapat hubungan jangka panjang, kerjasama, jaringan, hubungan timbal balik, dan keterbukaan akses. Ketiga modal ini memiliki hubungan yang erat, misalkan modal pembiayaan dan manusia akan menghasilkan pengetahuan dan pembelajaran. Modal manusia dan modal sosial akan menghasilkan organisasi, komunitas, dan budaya. Sementara itu, modal sosial dan pembiayaan akan menghasilkan strategi perdagangan.

Pada dasarnya, Cvetanovic et al (2015) membicarakan modal sosial lebih sebagai tumpuan pembangunan yang mempengaruhi pada institusi, hubungan, perilaku, dan nilai-nilai. Institusi tersebut memperlihatkan hubungan antara individual dengan organisasi di mana ada pemberian fasilitas aktivitas dan berkontribusi terhadap nilai-nilai pembangunan secara ekonomi. Bahkan ketika tidak ada fasilitas, bukan tidak mungkin akan membentuk *social movements* sebagai alat partisipasi dan itu termasuk salah satu modal sosial.

Modal sosial bahkan dipandang sebagai tumpuan pembangunan ekonomi (Cvetanovic et al, 2015). Bagaimanapun juga struktur dalam hubungan sosial seperti komunitas, organisasi, asosiasi, dan jalinan persahabatan menimbulkan kepercayaan. Hubungan tersebut tentu akan digunakan sebagai aksi bersama untuk memegang kendali perekonomian daerah, seperti pasar, korporasi, aliansi, dan jaringan-jaringan lokal. Pada akhirnya, hubungan tersebut akan menghasilkan efek pada aspek ekonomi seperti biaya transaksi, produktivitas, dan inovasi (Iravani, 2010). Dengan demikian, modal sosial dianggap penting untuk menciptakan perkembangan daerah bahkan ikut andil dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama di area perdesaan (Casieri, et al, 2010).

### **Model Kebijakan dalam Pengembangan Modal Sosial**

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Implikasinya adalah pembangunan kawasan pesisir ditujukan untuk tercapainya kemakmuran khususnya masyarakat lokal dan mewujudkan keadilan serta pemerataan kehidupan masyarakat. Namun demikian, kondisi di lapangan acap kali berbeda dengan tujuan diadakannya aturan nasional hingga daerah. Salah satu contohnya adalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir di beberapa daerah Indonesia. Paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan fisik, namun tidak dimaksimalkan pula pada modal sosial menyebabkan kondisi ketidakberdayaan. Tak ayal, banyak pula infrastruktur yang ada di kawasan pesisir namun tidak digunakan oleh masyarakat. Padahal, penekanan pembangunan kawasan tersebut terintegrasi dengan Program Nawacita. Selain itu, adanya agenda internasional yang di dalamnya termasuk Indonesia yaitu Agenda 21 sebagai bentuk kepedulian negara terhadap pembangunan berkelanjutan.



Salah satu topik dalam agenda 21 Indonesia terdapat beberapa program untuk mengatasi permasalahan pesisir dan laut (Pramudyanto, 2014), yaitu: pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesisir. Seperti diketahui bahwa saat ini, Indonesia masih mengalami masalah seperti sempitnya ruang gerak masyarakat (Makarim, 2002). Alhasil, tujuan dari pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesisir tidak tercipta sebagaimana yang diharapkan. Dampaknya adalah dalam pengelolaan kawasan pesisir, masyarakat tidak akan berpartisipasi aktif secara mandiri. Padahal konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan terfokus pada beberapa aspek dimana kualitas hidup masyarakat dan kerjasama dengan masyarakat merupakan bagian dalam aspek tersebut (Fabianto & Berhita, 2014). Oleh sebab itu, konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan merupakan integrasi antara sistem sosial dengan pembangunan.

Pengarusutamaan modal sosial sebagai basis pembangunan kawasan pesisir yang sebagian merupakan masih berkarakteristik pedesaan menjadi mutlak diwacanakan. Casieri, et al (2000) dalam penelitian berjudul *Trust Building and Social Capital As Development Policy Tools In Rural Areas*, mengemukakan bahwa modal sosial sebagai sumberdaya strategis dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dengan mengandalkan modal sosial maka terbukti efektif untuk meningkatkan kepercayaan antarjaringan dalam perencanaan pembangunan desa. Kepercayaan dalam studinya muncul dengan adanya penggalan pada ekspektasi masing-masing individual terhadap pembangunan, percaya terhadap perubahan yang lebih baik, dan kerelaan untuk berpartisipasi.

Beberapa tahun yang lalu di Eropa, pembangunan desa menekankan kebijakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat atau pendekatan *bottom-up* dalam program LEADER (Kovacs, et al, 2016). Masyarakat sebagai pemimpin dan diberikan kebebasan dalam proses pembangunan. Hubungan antar aktor lokal pembangunan sangat dijaga untuk menciptakan efektivitas dalam kerjasama. Hal inilah yang menyebabkan adanya kepercayaan dan jaringan antar pelaku pembangunan. Bahkan, model *bottom-up* menjadi program utama dalam pembangunan di desa yang tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat lokal tetapi juga hubungan kerjasama antara sektor publik dan sektor privat. Pembangunan di desa menghasilkan inovasi jaringan-jaringan sosial dan lokal. Dengan demikian, masyarakat bergerak secara sukarela sebagai aktor utamanya dan pemerintah daerah serta pelaku usaha (swasta) berperan sebagai mitranya.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, keuntungan dari adanya jaringan-jaringan lokal di lingkungan masyarakat akan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sekitarnya (Farouk & Husin, 2015). Di samping itu, modal sosial terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berdampak positif terhadap pembangunan. Di penelitian lainnya dengan fokus peranan modal sosial terhadap perkembangan ekonomi, modal sosial sebagai alat kerjasama kolektif terbukti berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi ke yang lebih baik (Liang, 2015). Bahkan, dengan mengandalkan modal sosial dapat mengendalikan kondisi pasar karena adanya komunikasi, kolaborasi, dan interaksi antaraktor.

### **Metode Penelitian**

Dengan pertimbangan tujuan dan fokus penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Dasar pemilihan metode kualitatif dikarenakan peneliti mencoba menemukan teori dasar berdasarkan hasil temuan di lapangan, menginterpretasi data-data yang cenderung dinamis, dan membatasi studi dengan fokus penelitian dan bisa pula batasannya merupakan lokasi studi (Creswell, 2013 & Moleong, 2010). Sementara itu, pemilihan pendekatan studi kasus dikarenakan memahami isu dan masalah pada satu kasus atau beberapa kasus sehingga dapat dijelaskan secara deskripsi hasil penelitian ini (Creswell, 2014). Studi kasus yang dimaksud di sini adalah karakteristik modal sosial yang dibatasi oleh lokasi studi sebagai obyek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara kunjungan/pengamatan di lapangan (survei), *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara berbagai *stakeholders* terkait, termasuk: instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, pengelola TPI, pemerintah kelurahan/desa, dan kelompok nelayan. Pemilihan responden dilakukan dengan cara *snowball* atas masukan dari responden satu ke yang lainnya guna mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. Sementara data sekunder diperoleh dengan cara kunjungan guna mengumpulkan data-data dan laporan dari instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan), Kantor Kecamatan, Kantor TPI, dan Pemerintah Kelurahan/Desa.

Untuk lokasi studi, dalam penelitian ini semuanya berada di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang dengan lokasi spesifiknya, antara lain:

- 1) Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga

- 2) Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi
- 3) Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji

Dasar pemilihan Kabupaten Tangerang sebagai obyek penelitian adalah kabupaten tersebut merupakan *pilot project* untuk agenda nasional penataan kawasan pesisir dalam balutan *Indonesia Bebas Kumuh 2020*. Sementara untuk pemilihan desanya, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini sedang fokus pembangunan pada kawasan-kawasan pesisir termasuk ketiga obyek penelitian tersebut. Ketiga desa tersebut menjadi daerah prioritas penyelenggaraan hunian layak atau program bebas kumuh. Dalam Surat Keputusan Peraturan Bupati Tangerang No: 050/Kep.47-Huk/2015 Perihal Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang, dicantumkan bahwa Kelurahan Dadap tergolong kumuh berat dengan total luasnya 9,88 Ha, Desa Tanjung Pasir tergolong ringan dan sedang dengan total luasnya 3,06 Ha, sedangkan Desa Suryabahari tergolong kumuh ringan dengan totalnya 2,51 Ha. Pemerintah berupaya untuk memberantas permukiman kumuh dan kemiskinan yang terjadi di kawasan pesisir sesuai dengan acuan SK tersebut. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam kebijakan pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang.

## **Pembahasan**

Berikut ini hasil temuan di lapangan yang didapat berdasarkan observasi, wawancara, dan FGD oleh peneliti dan rekan-rekan. Dari hasil data temuan di lapangan kemudian dilakukan analisis sehingga menjadi bahan rekomendasi pengembangan modal sosial di kawasan pesisir.

## **Kondisi Geografis Kelurahan Dadap**

Kelurahan Dadap terletak di perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta (Kota Jakarta Utara). Desa ini memiliki luas wilayah yaitu 4.014 km<sup>2</sup> atau 13,63% dari luas wilayah Kecamatan Kosambi. Berdasarkan tinjauan di lapangan, desa ini merupakan kawasan rawan bencana abrasi air laut dan ancaman banjir. Kerap sekali jika luapan air Laut Jawa tinggi dan masuk ke permukiman warga maka akan menyebabkan banjir dengan ketinggian antara 5-45 cm. Tentu hal ini menimbulkan masalah bagi aktivitas warga sekitar.

**Gambar 1. Potret Permukiman Nelayan di Kelurahan Dadap**



Sumber: Hasil survei lapangan, 2018.

Jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Dadap adalah 35.795 jiwa dengan proporsi berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki sebanyak 18.473 jiwa dan perempuan sebanyak 17.322 (Kecamatan Kosambi Dalam Angka 2017). Sebagian besar penduduk di Kelurahan Dadap bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi banyak pula yang bekerja sebagai nelayan. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan ada sekitar 431 orang yang terbagi menjadi 24 kelompok nelayan dimana masing-masing kelompok memiliki 18-23 anggota (sumber wawancara dengan Bapak Saurudin (53) selaku Ketua Kelompok Nelayan Kelurahan Dadap, 2018). Untuk mendukung kegiatan nelayan, maka dibangunlah Koperasi Mina Dadap Bahari yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 dengan anggota semua nelayan di Kelurahan Dadap.

Berdasarkan wawancara dengan ketua nelayan di Kelurahan Dadap, rata-rata penghasilan bersih nelayan perbulannya berkisar Rp. 600.000,00. Sementara itu, data hasil survei Bappeda Kabupaten Tangerang, kisaran pendapatan masyarakat Kelurahan Dadap mulai dari Rp. 600.000,00 sampai dengan Rp. 2.200.000,00 yang tidak hanya dari pekerjaan nelayan tetapi juga perdagangan dan jasa. Bila dilihat dari kisaran pendapatan baik sektor nelayan maupun perdagangan dan jasa, maka penduduk di Kelurahan Dadap terbilang masih jauh dari pendapatan ideal atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tangerang yaitu Rp. 3.555.834,67 di

tahun 2018. Penetapan UMK tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep 442-Huk/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018. Secara garis besarnya, penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan masih jauh dari kata layak untuk pendapatannya.

Sarana prasarana pendukung aktivitas nelayan di Kelurahan Dadap masih tergolong minim. Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat untuk pemasaran hasil tangkapan nelayan. Oleh karena itu, proses pemasaran dilakukan antara nelayan dan tengkulak. Implikasinya, harga yang ditawarkan oleh tengkulak terbilang murah dibandingkan harga pasar. Bahkan, kesempatan nelayan mendapatkan keuntungan banyak tidak besar. Namun demikian, ada beberapa nelayan yang menjual ikannya ke restoran sekitar seperti di Restoran *Seafood* Dadap Indah.

Untuk potret permukiman masyarakat di Kelurahan Dadap, khususnya di Kampung Baru Dadap, sangat miris. Kualitas bangunan yang rendah yang bisa dilihat dari konstruksinya yang masih banyak berbahan dari bambu dan rumah warga masih kerap terkena banjir. Dari segi legalitas, permukiman masih didominasi rumah-rumah yang dibangun di atas lahan PT. Angkasa Pura II sehingga rawan penggusuran. Untuk jalan permukiman, ada yang berkontruksi aspal dan konblok dengan kondisi perlu penataan karena banyaknya jalan berlubang. Di sisi lain, perlu adanya sempadan jalan bagi pejalan kaki terutama anak-anak sekolah yang harus berbagi jalan di jalan raya.

Penduduk masih mengalami krisis air bersih sebagai pendukung kehidupannya. Hal ini dikarenakan kualitas air di Kelurahan Dadap tergolong kotor sebagai akibat polutan yang ada. Rata-rata penduduk membeli air bersih dari tukang air (agen PDAM) yang dijual dalam kemasan diligen dengan harga Rp. 2.500,00. Dari sanitasi, masih ditemukannya penduduk yang membutuhkan fasiitas sanitasi layak. Tidak semua rumah memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak pakai. Di sisi lain, drainase di kelurahan ini kerap terhambat dengan sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh warga maupun orang luar.

### **Kondisi Geografis Desa Tanjung Pasir**

Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Tanjung Pasir adalah 5,64 km<sup>2</sup> atau sebesar 10,58% dari total luasan Kecamatan Teluknaga. Berdasarkan data tersebut maka Desa Tanjung Pasir merupakan desa terluas di Kecamatan Teluknaga nomor 3 setelah Desa Tanjung Burung

dan Desa Pangkalan. Untuk ketinggian tempatnya bila dilihat dari dokumen Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2017 sebesar 1 meter dpl. Dengan angka dplnya tersebut, maka wilayah Desa Tanjung Pasir memiliki kerawanan terhadap bencana banjir bila terjadi abrasi pantai. Berdasarkan dokumen Profil Desa Tanjung Pasir Dalam Angka 2015, jumlah penduduknya sebanyak 10.144 jiwa. Angka tersebut tidak begitu terjadi perubahan besar bila melihat perkembangan jumlah penduduk di desa tersebut. Tahun 2010 jumlah penduduk desa ini sebanyak 9.168 jiwa.

Di Desa Tanjung Pasir masih banyak didominasi oleh penduduk lulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat yaitu sejumlah 2.864 jiwa. Untuk selanjutnya penduduk merupakan lulusan SMP/sederajat sebanyak 1.576 jiwa, lulusan SMA/sederajat sebanyak 1.148 jiwa, dan tidak sekolah juga termasuk banyak yaitu 973 jiwa. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengenyam bangku pendidikan, penduduk di Desa Tanjung Pasir termasuk rendah kualitas sumberdaya manusianya. Dari segi mata pencaharian, penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 5.261 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dalam distribusi mata pencaharian penduduk di Desa Tanjung Pasir. Bahkan 50% lebih penduduk di Desa Tanjung Pasir berprofesi sebagai nelayan.

Jumlah nelayan yang banyak di Desa Tanjung Pasir didukung oleh sarana dan prasarana sektor perikanan. Salah satunya TPI Tanjung Pasir yang digunakan oleh nelayan sebagai tempat pemasaran hasil tangkapannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas TPI Tanjung Pasir, tahun 2015 jumlah produksinya sebanyak 82.653 kg dan menurun di tahun 2015 sebanyak 75.088 kg. Rata-rata penghasilan nelayan di Desa Tanjung Pasir adalah Rp. 800.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 per bulannya. Angka ini masih terbilang jauh dari nilai UMK Kabupaten Tangerang sehingga dapat dikategorikan masyarakatnya tergolong pendapatan rendah.

**Gambar 2. Pelelangan Ikan di TPI Tanjung Pasir**



Sumber: Hasil survei lapangan, 2018.

Untuk permukiman di Desa Tanjung Pasir, masalah utama adalah ketiadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan akses sumber air bersih. Daerah ini airnya termasuk kategori air payau sehingga tidak bagus untuk dikonsumsi. Kondisi jalan lingkungan tergolong sudah baik dengan konstruksi pengerasan berbahan aspal. Rumah-rumah warga termasuk rumah permanen dengan konstruksi terbuat dari tembok. Namun demikian, jarak antara bangunan terbilang sempit atau rapat sehingga diperlukan penataan ruang. Beberapa warga masih mengalami keterbatasan kepemilikan MCK. Oleh sebab itu, sebagian warga menggunakan MCK plus yang merupakan bantuan dari Pemerintah. Fasilitas drainase tidak berfungsi dengan baik karena ada hambatan yaitu penyumbat dari sampah-sampah yang ada. Hal ini berpotensi terhadap adanya banjir di permukiman warga Desa Tanjung Pasir.

### **Kondisi Geografis Desa Suryabahari**

Desa Suryabahari terletak di Kecamatan Pakuhaji memiliki luas wilayah seluas 3,10 km<sup>2</sup> dengan tipologi utamanya yaitu nelayan dan pertanian (162 Ha). Luas ini dalam distribusinya wilayah kecamatan sebesar 6,7%. Untuk ketinggian wilayah, desa ini memiliki ketinggian sebanyak 1 Dpl. Dengan demikian, desa ini merupakan kawasan pesisir yang dekat dengan Laut Jawa tetapi rentan pula terhadap abrasi pantai.

Jumlah penduduk di Desa Suryabahari tahun 2016, menurut dokumen Kecamatan Pakuhaji Dalam Angka 2017, adalah sebanyak 7.033 jiwa. Berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk laki-laki sebanyak 3.734 jiwa dan perempuannya sebanyak 3.299 jiwa. Untuk rasio

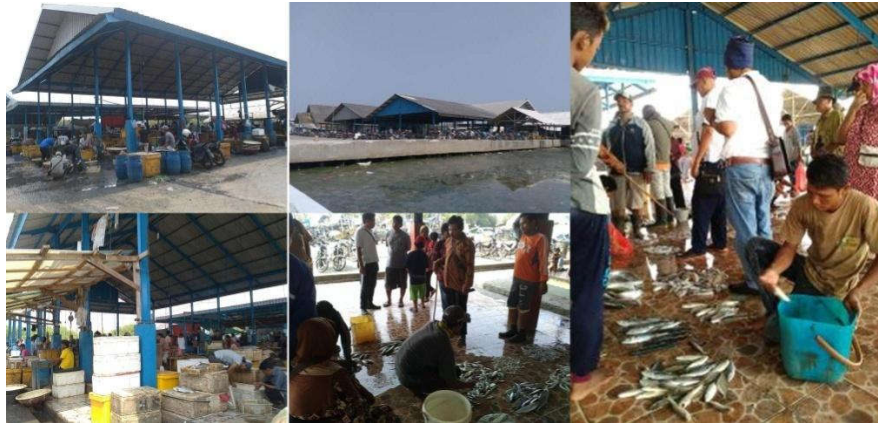
jenis kelaminnya adalah 113,19, maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Angka ini juga menunjukkan potensi dalam hal kontribusinya terhadap pembangunan yaitu proses pembangunan akan lebih banyak dimainkan oleh tenaga laki-laki. Bila dilihat dari mata pencaharian penduduk, dikarenakan secara tipologi merupakan kawasan pesisir yang potensial terhadap nelayan, maka profesi nelayan menjadi dominasi mata pencaharian sebanyak 2.750 orang.

Untuk kualitas sumberdaya manusianya, peneliti melihat berdasarkan data yang ada di Pemerintah Desa Suryabahari tergolong rendah. Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas penduduk di Desa Suryabahari merupakan penduduk tidak sekolah dan tidak lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 856 orang. Sementara yang lain adalah lulusan tingkat pendidikan SD sebanyak 537 orang, SMP sebanyak 201 orang, dan sisanya lulusan SMA/SMU (28 orang), Sarjana (21 orang).

Dampak dari rendahnya kualitas penduduk di Desa Suryabahari yaitu banyaknya jumlah penduduk yang tergolong miskin. Berdasarkan data dari Pemerintah Kecamatan Pakuhaji tahun 2015, penduduk di Desa Suryabahari yang tergolong miskin sebanyak 3.456 jiwa atau 1.100 keluarga. Rata-rata penduduk miskin ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Pendapatannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00 per bulan. Angka ini dirasa masih kurang memenuhi kebutuhan keluarga di mana setiap keluarga beranggotakan rata-rata 4 orang. Selain itu, secara nominal angka ini berada di bawah standar UMK Kabupaten Tangerang. Desa Suryabahari cenderung maju dalam hal perikanan karena hasil tangkapan sebagian sudah dapat didistribusikan ke Muara Angke, Kota Jakarta Utara. Tahun 2016, jumlah produksi ikan sebanyak 431.569 kg yang senilai dengan Rp. 5.771.869.000,00, kemudian tahun 2017, jumlah produksinya menjadi 123.268 kg per Agustus.



**Gambar 3. Potret Aktivitas Nelayan di TPI Cituis**



Sumber: Hasil survei lapangan, 2018.

Dari lembaga nelayan, terdapat 20 kelompok atau komunitas di Desa Suryabahari, di mana masing-masingnya memiliki ketua yang berbeda-beda. Satu kelompok memiliki anggotanya berkisar dari 30-50 orang. Kelemahannya setiap kelompok nelayan tidak saling berkoordinasi sehingga masing-masing kelompok hanya mementingkan anggotanya. Tidak adanya ketua umum menyebabkan kurang koordinasi dan pemimpin dalam meningkatkan koordinasi antar kelompok.

Untuk sarana dan prasarana, beberapa kelemahan di Desa Suryabahari adalah ketiadaan air bersih. Kondisi air di desa ini tergolong air payau bahkan telah menggunakan sumur bor dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Hal ini berarti sumur bor milik warga harus memiliki kedalaman lebih dari 100 meter untuk mendapatkan air bersih yang tidak payau. Dari sisi persampahan, di permukiman warga belum ditemukan TPS sampah sehingga mudah ditemukan tumpukan sampah, terutama di kawasan TPI Cituis. Bila dilihat dari sisi kondisi fisik rumah warga, sebanyak 5% bangunan tempat tinggal tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun demikian, mayoritas telah berkontruksi permanen atau tembok.

### **Karakteristik Modal Sosial**

Berikut ini adalah hasil temuan karakteristik modal sosial di lokasi studi yang terangkum dalam tabel panjang di bawah ini.

**Tabel 1. Karakteristik Modal Sosial Masyarakat Nelayan di Lokasi Studi**

No	Aspek Modal Sosial	Indikator	Kondisi di Lapangan		
			Kelurahan Dadap	Desa Tanjung Pasir	Desa Suryabahari
1	Jaringan Sosial	Komunitas/kelompok	Terdapat 24 kelompok nelayan yang terdiri dari 18-23 anggota oleh masyarakat.	Terdapat 20 kelompok nelayan yang terdiri dari 30-40 anggota oleh masyarakat.	Terdapat 20 kelompok nelayan yang terdiri dari 40-50 anggota oleh masyarakat.
		Hubungan kerjasama	Tergolong tinggi baik dalam satu kelompok maupun antarkelompok.	Tergolong tinggi bila dalam satu kelompok sementara antarkelompok tergolong sedang. Hubungan antarkelompok hanya tampak pada acara budaya <i>nyadran</i> .	Tergolong tinggi bila dalam satu kelompok sementara antarkelompok cenderung berhubungan dengan kelompok tertentu yang dianggap memberikan <i>benefit</i> .
		Hubungan jangka panjang	Adanya ketua umum sebagai mediator dalam rencana pengembangan seluruh kelompok nelayan.	Tidak memiliki rencana pengembangan jangka panjang.	Tidak memiliki rencana pengembangan jangka panjang.
		Lapisan sosial	Dikarenakan sama rata yaitu penduduk miskin maka tidak tercipta lapisan sosial.	Ada lapisan sosial secara materi tetapi tidak begitu mempengaruhi eksistensi kelompok dan hubungan sosial antarnelayan.	Sangat terlihat perbedaan lapisan sosial antara nelayan kaya dengan nelayan biasa.

No	Aspek Modal Sosial	Indikator	Kondisi di Lapangan		
			Kelurahan Dadap	Desa Tanjung Pasir	Desa Suryabahari
		Keterbukaan akses	Adanya ketua umum maka antarkelompok memiliki hubungan kuat dan saling terbuka dalam akses pendapatan dan pengembangan kelompok.	Tidak adanya ketua umum menyebabkan tiap-tiap kelompok kurang dalam hal keterbukaan informasi (kurang berbagi informasi).	Tiap-tiap kelompok kurang dalam hal keterbukaan informasi (kurang berbagi informasi).
		<i>Proactivity</i>	Kelompok nelayan akan selalu bersedia mengikuti kegiatan rencana pengembangan daerah tetapi ada batasnya.	Kelompok nelayan akan selalu bersedia mengikuti kegiatan rencana pengembangan daerah.	Kelompok nelayan akan selalu bersedia mengikuti kegiatan rencana pengembangan daerah.
		Partisipasi dalam kegiatan desa	Tidak semua rencana pengembangan desa akan diikuti oleh kelompok nelayan tergantung dari dampak rencana tersebut (untung rugi).	Rencana pengembangan desa berkaitan dengan kawasan nelayan akan diikuti oleh kelompok nelayan.	Hingga saat ini belum ada kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa, lebih bersumber dari pengelola TPI saja.
2	Norma	Landasan aturan	Aturan hanya berupa lisan yang didasarkan pada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum.	Aturan hanya berupa lisan yang didasarkan pada norma agama, kesopanan, dan hukum.	Aturan hanya berupa lisan yang didasarkan pada kesadaran tiap-tiap nelayan dan dipengaruhi pula oleh agama, kesopanan, dan

No	Aspek Modal Sosial	Indikator	Kondisi di Lapangan		
			Kelurahan Dadap	Desa Tanjung Pasir	Desa Suryabahari
					kesusilaan.
		Hubungan dengan budaya	Tingkat kepatuhan tergolong tinggi sehingga sudah membudidaya di lingkungan tersebut.	Tingkat kepatuhan tergolong tinggi terlebih didukung dengan adanya perayaan <i>nyadran</i> .	Tingkat kepatuhan tergolong tinggi karena ada ketakutan jika melanggar akan dikucilkan.
		Pembentukan aturan	Dilakukan melalui musyawarah mufakat.	Dilakukan melalui musyawarah mufakat yang didampingi oleh pemerintah desa dan pengelola TPI Tanjung Pasir.	Dilakukan melalui musyawarah mufakat.
3	Kepercayaan	Hubungan antaranggota	Saling percaya antaranggota karena intensitas pertemuan dan persamaan nasib.	Saling percaya antaranggota karena persamaan nasib dan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam satu kelompok.	Saling percaya antaranggota karena persamaan nasib yaitu bekerja sebagai nelayan.
		Hubungan antarkelompok	Saling percaya antarkelompok karena persamaan nasib.	Tidak membentuk rasa saling percaya antarkelompok karena adanya persaingan dalam mencari ikan.	Tidak membentuk rasa saling percaya antarkelompok bahkan cenderung saling menjatuhkan dalam informasi bantuan.

No	Aspek Modal Sosial	Indikator	Kondisi di Lapangan		
			Kelurahan Dadap	Desa Tanjung Pasir	Desa Suryabahari
		Hubungan timbal balik	Saling menghormati dan menolong antarkelompok.	Saling membantu dalam perayaan <i>nyadran</i> sementara saat aktivitas kenelayan tidak tercipta timbal balik antarkelompok.	Untuk beberapa kelompok yang dekat hubungan timbal balik saling memberikan informasi bantuan, sementara dengan kelompok lainnya tidak ada hubungan timbal balik.
		Keterbukaan informasi antaranggota	Tiap anggota saling berbagi informasi lokasi mencari ikan, penjualan, dan keuntungan.	Tiap anggota saling berbagi informasi.	Tiap anggota saling berbagi informasi.
		Keterbukaan informasi antarkelompok	Tiap kelompok saling berbagi informasi lokasi mencari ikan, penjualan, dan keuntungan.	Tiap kelompok belum saling berbagi informasi.	Tiap kelompok belum saling berbagi informasi hanya dengan kelompok tertentu saja.
		Kebutuhan hubungan antaranggota dan antarkelompok	Ada rasa kebersamaan antaranggota maupun antarkelompok karena sadar saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengembangkan	Hubungan jalinan komunikasi antaranggota tergolong tinggi sementara untuk antarkelompok belum tercipta karena masih mementingkan kelompoknya saja.	Hubungan jalinan komunikasi antaranggota dalam satu kelompok tergolong tinggi untuk saling melengkapi kebutuhannya, sementara untuk antarkelompok

No	Aspek Modal Sosial	Indikator	Kondisi di Lapangan		
			Kelurahan Dadap	Desa Tanjung Pasir	Desa Suryabahari
			kelompok dan meningkatkan kesejahteraan bersama.		secara luas belum tercipta dan cenderung saling menjatuhkan.
		Tingkat percaya pada pemerintah setempat	Tingkat percaya tergantung pada resiko kerugian dan keuntungan yang didapat.	Tingkat percaya kepada pemerintah desa tergolong tinggi.	Tidak terjalin kepercayaan dengan pemerintah desa karena pemerintah desa tidak pernah melakukan komunikasi dan memberikan bantuan.
		Pengaruh eksternal	Isu pembangunan reklamasi yang bisa memecahkan hubungan antarkelompok.	Sosok pemimpin kepala desa yang mampu mengakomodir kebutuhan nelayan sehingga dengan mudah menggerakkan kelompok nelayan.	Ketidakaktifan dan ketidakdekatan pemerintah desa terhadap nelayan berpengaruh terhadap tingkat percaya nelayan kepada pemerintah desa.

Sumber: Hasil pengolahan, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis membagi beberapa kategori dengan melihat karakteristik modal sosial dari ketiga lokasi studi:

- a. Kelurahan Dadap tergolong memiliki modal sosial yang kuat, baik dari jaringan sosial, kepatuhan tinggi terhadap norma, dan kepercayaan (antaranggota dan antarkelompok tetapi dengan pemerintah kelurahan masih mempertimbangkan risiko kebijakan terhadap kehidupan nelayan).

- b. Desa Tanjung Pasir tergolong memiliki modal sosial yang sedang karena hanya menonjol pada jaringan sosial antaranggota sementara antarkelompok hanya momentum perayaan bersama, kepatuhan tinggi terhadap norma, dan kepercayaan cukup tinggi dengan pemerintah desa tetapi tidak dalam antarkelompok dalam kesehariannya.
- c. Desa Suryabahari tergolong memiliki modal sosial yang lemah karena hubungan kuat dalam jaringan sosial dan kepercayaan hanya terjalin antaranggota dalam satu kelompok, sementara antarkelompok hanya terjalin ke beberapa kelompok saja. Untuk norma, tiap-tiap anggota tergolong memiliki kepatuhan yang tinggi.

### **Inovasi Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Modal Sosial**

Berdasarkan karakteristik modal sosial di kawasan pesisir ketiga lokasi studi di Kabupaten Tangerang di atas, maka peneliti melihat masih adanya peluang pengembangan modal sosial yang lebih baik. Beberapa strategi yang bisa dilakukan, antara lain:

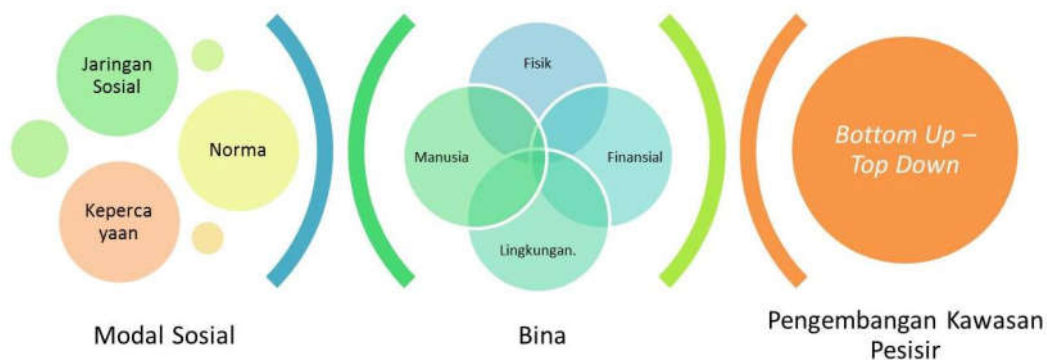
- 1) Menciptakan suasana kondusif dan komunikatif antara pemerintah kelurahan/desa dengan kelompok nelayan. Misalkan pemerintah setempat melakukan pendekatan persuasif untuk melihat keinginan dan kebutuhan nelayan.
- 2) Sering dilakukan dialog komunikasi antarkelompok sehingga menguatkan jalinan tali persaudaraan. Dalam hal ini bisa dimediasikan oleh pemerintah kelurahan/desa sehingga tantangannya adalah adanya waktu secara tertib untuk mengumpulkan kelompok-kelompok nelayan yang tentu berimbas pada ruang, waktu, dan biaya.
- 3) Perlu diadakan perayaan syukuran hasil tangkap nelayan seperti yang diberlakukan di Desa Tanjung Pasir sehingga antarkelompok saling berkumpul dan saling membantu. Hal ini untuk meningkatkan komunikasi antarkelompok dan memitigasi adanya prasangka saling menjatuhkan antarkelompok.
- 4) Diperlukan pembentukan kelompok besar sebagai akomodir kebutuhan komunikasi antarkelompok seperti di Kelurahan Dadap. Strategi ini sangat efektif untuk menyatukan antarkelompok dan membina kekeluargaan. Di sisi lain, ketika ada masalah antarkelompok akan mudah dimediasikan.
- 5) Pembentukan koperasi yang dikelola antarkelompok dengan diakomodir dan diawasi oleh pemerintah kelurahan/desa. Dengan adanya koperasi maka akan meningkatkan rasa

tanggung jawab kebersamaan untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok nelayan yang ada.

- 6) Penggunaan teknologi HT yang digunakan seluruh kelompok nelayan dalam satu saluran sehingga antarkelompok nelayan akan saling berbagi informasi. HT ini dapat diberikan perkelompok satu yang bisa diakomodir oleh pemerintah kelurahan/desa.
- 7) Keterbukaan informasi tidak hanya dari sisi antarkelompok nelayan, tetapi juga harus dari pemerintah kelurahan/desa sehingga setiap rencana pembangunan berkaitan dengan wilayah sumber penghidupan nelayan, tidak akan terjadi kericuhan seperti di Kelurahan Dadap.
- 8) Diperlukan pembentukan ketua umum kelompok nelayan sehingga memudahkan penyelesaian apabila ada masalah antarkelompok. Tantangannya adalah pemilihan ketua kelompok harus netral terhadap kepentingan semua kelompok nelayan.

Kebutuhan nelayan merupakan indikasi bahwa daerah tersebut perlu pengembangan kawasan. Pengembangan dilakukan sebaiknya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jika memang di kawasan pesisir maka pengembangan kawasan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan nelayan. Peneliti melihat bahwa kebutuhan nelayan berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan kawasan, terdiri dari modal fisik (infrastruktur pendukung aktivitas nelayan), modal finansial (pembelian alat-alat bantuan nelayan), modal alam (hutan mangrove sebagai ekosistem biota laut), modal sosial (penguatan jaringan sosial dan kepercayaan), dan modal manusia (peningkatan kapasitas masyarakat nelayan).

**Gambar 4. Inovasi Pengembangan Kawasan Berbasis Modal Sosial**



Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2018.



Gambar di atas menunjukkan bahwa modal sosial merupakan aspek penting dalam pengembangan kawasan pesisir. Beberapa indikator dari tiap-tiap aspek modal seperti jaringan sosial, norma, dan kepercayaan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan kawasan pesisir. Terlebih hal ini berkaitan dengan partisipasi dari masyarakat. Dalam jaringan sosial, tinjauan di lapangan menunjukkan bahwa sudah ada embrio komunitas yang bisa diberdayakan dalam pengembangan kawasan, yaitu kelompok nelayan. Pembenaannya adalah peningkatan komunikasi dan interaksi internal sehingga terjadi penguatan hubungan kerjasama, terutama di Desa Suryabahari dan Desa Tanjung Pasir. Penulis melihat bahwa untuk agenda pengembangan kawasan pesisir, tantangannya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah penguatan modal sosial kelompok nelayan. Dengan demikian, proses perencanaan hingga implementasi kebijakan akan mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan setiap anggota nelayan dari beberapa kelompok nelayan secara sadar berkomitmen untuk mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir oleh pemerintah kelurahan/desa akan lebih mudah dilaksanakan, bila telah mendapatkan kepercayaan kelompok nelayan. Oleh sebab itu, pemerintah kelurahan/desa harus lebih sensitif dan peka terhadap kondisi kelompok nelayan di daerahnya. Terlebih jika pemerintah kelurahan/desa berinovasi dalam pemberian bantuan kepada nelayan melalui APBDesa. Hal ini tentu akan mempermudah dalam mendapatkan hati masyarakat nelayan sehingga berdampak positif terhadap rencana kebijakan pengembangan kawasan pesisir. Pada dasarnya, pemerintah kelurahan/desa harus lebih aktif dekat dengan kelompok nelayan sehingga meningkatkan kepercayaan dari nelayan.

Salah satu langkah untuk mendapatkan kepercayaan kelompok nelayan adalah kebijakan harus mampu mengakomodir kebutuhan nelayan. Strategi yang digunakan adalah menekankan pada metode partisipatif yaitu *bottom-up* (dari bawah). Penjaringan kebutuhan masyarakat dalam agenda musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan/desa akan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan dari kelompok nelayan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa masyarakat juga tidak bisa dilepas dalam mengungkapkan kebutuhannya. Ada kecenderungan masyarakat tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan sehingga dalam proses perumusan perencanaan tetap didampingi oleh pemerintah kelurahan/desa. Terlebih karakteristik anggota nelayan yang secara kualitas SDM dari sisi pendidikan berada pada garis di bawah SMP bahkan banyak yang tidak sekolah. Dengan demikian, metode *top-down* tetap harus

dijalani untuk melihat rencana pengembangan ke depannya yang disusun oleh pemerintah kelurahan/desa atau bermitra dengan akademisi. Peneliti melihat bahwa penggabungan antara metode *bottom up* dan *top-down* merupakan salah satu *win win solution*.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang baik tidak hanya membangun kawasan dari sisi fisik saja. Akan tetapi, diperlukan pula kolaborasi dengan dimensi pembangunan lainnya. Berbagai contoh di Indonesia, pembangunan fisik seperti taman di Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta yang saat ini justru mangkrak tidak digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekitar. Contoh lainnya adalah pembangunan biogas di Desa Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo yang tidak lagi dimanfaatkan karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelolanya dan minimnya kapasitas finansial.

Kolaborasi antardimensi dalam pengembangan kawasan pesisir, menurut peneliti, bersifat *urgent*. Pemerintah daerah seharusnya melihat bahwa potensi di daerah tidak hanya dari ketersediaan fisik berupa infrastruktur saja, tetapi juga melihat potensi lainnya seperti masyarakat, lingkungan, dan kapasitas finansial. Peneliti melihat bahwa pengembangan kawasan pesisir harus mengadopsi dan mengembangkan konsep *tribina*. Jika di konsep *tribina* hanya melingkupi bina fisik, ekonomi/finansial, dan manusia saja, dalam penelitian ini ditambahkan kembali bina lain yang tidak kalah penting yaitu modal sosial dan lingkungan (tidak hanya fisik infrastruktur tetapi diperjelas tentang sumber daya alam). Pada dasarnya, konsep ini hampir seperti konsep *livelihood* yang mengarusutamakan kelima modal tersebut, tetapi peneliti menambahkan metode perencanaan dan memisahkan modal sosial dalam satu kerangka hubungan. Pentingnya kaitan antara modal satu dengan lainnya adalah jaminan terhadap terwujudnya *sustainable development*. Tidak ada lagi, pembangunan yang hanya berumur jangka pendek khususnya di kawasan pesisir sehingga manfaatnya benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat sekitarnya (baca: kelompok nelayan).

#### ❖ Bina Modal Fisik

Modal ini biasanya berupa infrastruktur pendukung aktivitas kenelayanan, seperti TPI, pasar ikan, kantor pengelola, dermaga, tempat *coolbox*, dan tempat penjemuran ikan. Dikarenakan biaya yang tinggi terhadap modal fisik ini maka diperlukan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang (APBD) maupun Pemerintah (APBN).

❖ Bina Modal Finansial

Modal ini biasanya sering menjadi kendala dalam implementasi rencana pengembangan kawasan pesisir, baik oleh pemerintah kelurahan/desa, pemerintah daerah, maupun Pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pemberdayaan mitra-mitra yang bukan lagi berkonsep pada CSR. Tetapi pada kemitraan saling berbagi risiko dan keuntungan, seperti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di sisi lain, diperlukan pemberdayaan dana komunal dari tiap-tiap kelompok nelayan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kepemilikan dan mengelola infrastruktur yang ada oleh kelompok nelayan.

❖ Bina Modal Lingkungan

Pembangunan tidak hanya sekedar menambahkan infrastruktur tetapi juga harus memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar. Model pembangunan seharusnya bergeser untuk lebih mengarusutamakan penghijauan terlebih kawasan pesisir. Kelalaian terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan lingkungan pesisir akan berimbas pada rawan bencana erosi dan abrasi, hilangnya biota-biota laut sehingga nelayan harus melaut lebih jauh, dan terjadi polusi laut.

❖ Bina Modal Sosial

Pembangunan tidak hanya menjadi kewenangan dari sektor publik tetapi wajib melibatkan masyarakat sekitar. Dalam pengembangan kawasan pesisir maka diperlukan partisipasi dari kelompok nelayan. Nelayan tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga harus menjadi subyek pembangunan. Pembangunan harus berlandaskan pada kebutuhan, tidak menyalahi norma yang berlaku, dan disetujui oleh kelompok nelayan. Karena pada dasarnya, kegiatan pemerintahan akan dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, kepercayaan dari jaringan sosial (kelompok nelayan) terhadap tujuan dari agenda pengembangan kawasan pesisir sangatlah dipertimbangkan. Menurut peneliti, modal sosial sangat penting berkaitan dengan keberhasilan proses pembangunan tersebut. Peneliti memisahkan modal sosial sebagai lingkaran sendiri dibandingkan modal lainnya karena modal sosial tercipta secara sadar oleh anggotanya di lingkungan masyarakat bukan dibuat oleh pemerintah kelurahan/desa.

#### ❖ Bina Modal Manusia

Pengembangan kawasan pesisir membutuhkan peran kelompok nelayan sebagai pengelola dari pembangunan infrastruktur tersebut. Tantangannya adalah rendahnya kualitas SDM yang ada apakah mampu mengelola infrastruktur yang baru. Oleh sebab itu, pengembangan kawasan juga harus mengembangkan pula potensi SDM yang ada. Karena tidak mungkin pemerintah akan membiayai infrastruktur yang ada untuk dana pengelolaan selamanya.

### **Penutup**

Modal sosial kerap dilupakan dalam proses pembangunan oleh sektor publik. Padahal, modal tersebut bernilai strategi untuk mendukung proses pembangunan. Pembangunan yang tidak disetujui oleh kelompok nelayan akan berimbas pada kegagalan pembangunan. Di satu sisi, modal sosial dilingkup kelompok nelayan tergolong tidak kuat sehingga akan menimbulkan pembangunan yang berpihak pada kelompok tertentu. Sebagaimana dijelaskan bahwa modal sosial meliputi jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, apabila salah satunya tidak dalam kondisi baik maka komitmen mengelola *output* pembangunan tidak akan berjalan. Di samping itu, modal sosial juga harus menjadi tolok ukur tingkat kepercayaan antara kelompok nelayan dengan pemerintah kelurahan/desa setempat. Oleh sebab itu, penting dalam pembangunan memperhatikan modal sosial sehingga kelompok nelayan akan memiliki rasa tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, karakteristik modal sosial kelompok nelayan di kawasan pesisir yang meliputi Kelurahan Dadap, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Suryabahari berbeda-beda. Karakteristik modal sosial kelompok nelayan di Kelurahan Dadap tergolong kuat karena adanya pemimpin umum nelayan sehingga bisa menyatukan antarkelompok. Karakteristik modal sosial kelompok nelayan di Desa Tanjung Pasir cenderung cukup kuat ketika perayaan *nyadran*, sedangkan hari-hari biasa justru lemah. Sementara itu, karakteristik modal sosial kelompok nelayan di Desa Suryabahari tergolong paling lemah karena terjadinya konflik antarkelompok sehingga saling menutupi akses.

Pengembangan kawasan pesisir tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi sesuai tidaknya selama proses pengembangan kawasan baik saat proses perencanaan hingga implementasi. Sesuai tidaknya ini

bergantung pada kelima modal pembangunan untuk mewujudkan *sustainable development*, yaitu: fisik, ekonomi, manusia, lingkungan, dan modal sosial. Setiap modal pembangunan saling terikat satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada satu modal pun yang dilalaikan. Di samping itu, metode pembangunan yang mengakomodir terhadap partisipasi masyarakat dan efektif adalah pencampuran antara *bottom-up* dengan *top-down*. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan/desa harus tahu batasan kapan menggunakan metode *bottom-up* dan kapan menggunakan *top-down*.

Ada beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti terkait inovasi pengembangan kawasan pesisir berbasis modal sosial, antara lain:

- (1) Pemerintah kelurahan/desa seharusnya lebih bisa mendekati diri kepada kelompok nelayan secara keseluruhan sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dari nelayan;
- (2) Pemerintah kelurahan/desa mengemban sebagai *public service* tidak hanya memberikan pelayanan dari pembangunan fisik saja, tetapi harus memperhatikan pula keseimbangan dan peningkatan modal ekonomi, manusia, lingkungan, dan modal sosial;
- (3) Modal sosial bukan hanya dipandang sebagai atribut pembangunan dalam teoritis tetapi nilai-nilai manfaatnya dapat merangsang kemandirian kelompok nelayan dalam pembangunan yang seharusnya diakomodir oleh pemerintah kelurahan/desa.

## Daftar Pustaka

- Astjario, P & Kusnida, D. 2011. "Tinjauan Aspek-Aspek Pembangunan yang Mempengaruhi Dampak Lingkungan Kawasan Pesisir Dan Laut", dalam *Jurnal Geologi Kelautan*. Vol. 9, No. 1. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.
- Boteler, Benjamin. 2014. *Coastal Zones: Achieving Sustainable Management*. Bristol: European Union.
- Casieri, A., Nazzaro, C., Roselli, L. 2010. "Trust Building and Social Capital as Development Policy Tools in Rural Areas", dalam *New Medit*. No.1. Italy: University of Bari.
- Creswell. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: Sage Publications.
- Creswell. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (A.L. Lazuardi Trans. 3 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Cvetanovic, S., Despotovic, D., Filipovic, M., 2015. "The Concept of Social Capital In Economy Theory", dalam *Journal Ekonomika: Scientific Review Article*. Vol. 61. No. 1. Jerman. Diunduh dalam <http://www.ekonomika.org.rs> (diakses 9 Maret 2018).
- Department of the Environment. 2015. *Planning in the Coastal Area*. United Kingdom (UK): NIEA.
- Fabianto, M, D & Berhita, P, T. 2014. "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat", dalam *Jurnal Teknologi*. Vol. 11. No. 2. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Farouk, A, F, A, & Husin, A. 2015. "Development and Social Capital: A Case Study Of Selected Malaysian Non-Governmental Organizations (NGOs)", dalam *Kajian Malaysia*. Vol. 33. No. 2. Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
- Fujiastuti, Asyifa. 2011. *Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kawasan Kota Pekalongan*. Skripsi Perencanaan Wilayah dan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iravani, M, R. 2010. "Role of Social Capital on Development", dalam *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*. Vol. 2. No. 2. Iran: Islamic Azad University.
- Iyer, L & Banerjee, A. 2005. "History, Institutions, and Economic Performance: The Legacy of Colonial Land Tenure Systems in India", dalam *The American Economic Review*, Vol. 95. No. 4. American: American Economic Association.
- Kovacs, K, J., Navarro, F, & Labianca, M. 2016. "Human and Social Capital In Rural Areas", dalam *Studies In Agricultural Economics*. <http://dx.doi.org/10.7896/j.1601>
- Lasabuda, Ridwan. 2013. "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol.1. No. 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Leijzer, M & Denman, R. 2013. *Tourism Development In Coastal Areas In Africa: Promoting Sustainability Through Governance and Management Mechanisms*. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
- Liang, Qiao, Huang, Z., Lu, H., Wang, . 2015. "Social Capital, Member Participation, and Cooperative Performance: Evidence from China's Zhejiang", dalam *International Food and Agriculture Management Review*. Vol. 18. Issue 1. Wayzata: Ifama.

- Makarim, Nabel. 2002. "Sambutan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tinjauan Agenda 21 di Indonesia" dalam <http://www.menlh.go.id/sambutan-menteri-lingkungan-hidup-tentang-tinjauan-agenda-21-di-indonesia/> (diakses 13 Maret 2018, pukul 12:29 WIB).
- Mashari & Mulyani, Sri. 2008. "Model Pengelolaan Terpadu Pembangunan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah", dalam *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5, No. 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Mohammad, Yandi. 2016. "Nasib Nelayan di Hari Nelayan Nasional", dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/nasib-nelayan-di-hari-nelayan-nasional> (diakses 7 Maret 2018, pukul 14:00 WIB).
- Moleong, L, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musaddun, Kurniawati, W, Dewi, S, P, & Ristianti, N, S. 2013. "Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan", dalam *Jurnal Ruang*. Vol. 1. No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Desa Tanjung Pasir. 2017. *Data Monografi Desa Tanjung Pasir Tahun 2017*. Desa Tanjung Pasir: Pemerintah Desa Tanjung Pasir.
- Pemerintah Kecamatan Kosambi. 2017. *Kecamatan Kosambi Dalam Angka 2017*. Kosambi: Pemerintah Kecamatan Kosambi.
- Pemerintah Kelurahan Dadap. 2016. *Data Monografi Kelurahan Dadap Tahun 2016*. Kelurahan Dadap: Pemerintah Kelurahan Dadap.
- Pramudyanto, Bambang. 2014. "Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir", dalam *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. No. 4. Banten: Pusdiklat Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rahman, Sihabur. 2015. Thesis: *Coastal Tourims Development: Case Study Cox's Bazar, Bangladesh*. Kokkola: Centria University of Applied Scences.
- Redaksi Tangerang Online.2018. "Pembangunan Fisik Masih Jadi Prioritas di Kecamatan Tangerang", dalam <https://tangerangonline.id/2018/02/13/pembangunan-fisik-masih-jadi-prioritas-di-kecamatan-tangerang/> (diakses 7 Maret 2018, pukul 12:27 WIB).
- Ridho, Rasyid. 2017. "Ini Daftar UMK 2018 Se Provinsi Banten, WH: Kalau Protes ke Pusat", dilansir dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1259071/174/ini-daftar-umk-2018-se-provinsi-banten-wh-kalau-protes-ke-pusat-1511178623> (diakses 7 Maret 2018, pukul 11:03 WIB).

- Rustiadi, Ernan. 2003. Makalah: “Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah”, dalam Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu pada tanggal 11 Agustus-18 Oktober 2003. Bogor: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Siahaan, N, H, T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Staeher, P, A., Sheikh, M., Rashid, R., Ussi, A., Sulaeman, M., Kloiber, U., Dahl, K., Tairova, Z., Strand, J., Kuguru, B., & Muhandu, C. 2018. “Managing Human Pressure To Restrore Ecosystem Health Of Zanzibar Coastal Waters”, dalam *Journal of Aquaculture & Marine Biology*. Vol. 7. No. 2. Denmark: Med Crave.
- Sugiarto, E, C. 2017. “Memacu Infrastruktur, Mempercepat Pemerataan Pembangunan”, dalam <http://setkab.go.id/memacu-infrastruktur-mempercepat-pemerataan-pembangunan/> (diakses 7 Maret 2018, pukul 16:05 WIB).